BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki fungsi dan tugas pokok yaitu untuk melaksanakan sebagian fungsi dan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta bertanggung jawab dengan pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. DJBC juga memiliki 4 fungsi utama yaitu sebagai *revenue collector*, *community protector*, *trade facilitator* dan *industrial assistance*. Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Community Protector*, yaitu DJBC berusaha untuk melakukan fungsi pengawasan demi melindungi industry dan masyarakat di Indonesia dari masuknya barang-barang yang berpotensi membahayakan masyarakat dan industri itu sendiri. Salah satunya seperti barang-barang yang peraturannya dibuat oleh instansi teknis dan peraturan itu ditegakkan oleh aparat bea cukai dalam ketentuan barang larangan dan pembatasan.

Barang larangan dan/atau pembatasan (lartas) adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor maupun ekspornya. Penetapan ketentuan barang lartas atas impor maupun ekspor ini dilakukan oleh instansi teknis terkait dan penetapannya wajib diberitahukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menurut Maringan (Simbolon, 2003), Pengawasan adalah Proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Harahap (Harahap, 2001), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, tehnik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu merupakan suatu tindakan pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan pimpinan untuk memastikan bahwa tujuan suatu organisasi tersebut tercapai dan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan berjalan serta melakukan tindakan mitigasi jika terjadi kesalahan – kesalahan yang perlu diperbaiki.

Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan XV tentang penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor yang berguna untuk mempermudah dan mempercepat arus barang keluar. Salah satu strateginya yaitu pergeseran pengawasan pada tata niaga *Border* yaitu dalam kawasan pabean ke *Post Border* yaitu keluar kawasan pabean. Penyederhanaan ini memungkinkan barang pada tata niaga *Post Border* dapat langsung keluar daerah pabean setelah dilakukannya *customs clearance* sehingga mempercepat *dwelling time*.

Melalui pengawasan *Post Border* ini petugas Beacukai berperan untuk melakukan pemeriksaan nilai tarif, pemeriksaan fisik dan nilai pabean untuk memastikan penetapan tarif terhadap barang-barang larangan dan pembatasan impor maupun ekspor yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tata Niaga Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur serta memperbaiki fungsi tubuh.

Barang impor berupa Alat kesehatan ke Indonesia adalah salah satu dari barang larangan dan pembatasan yang sudah masuk *Post Border* yang artinya bukan Beacukai lagi yang melakukan pengawasan atas importasi Alat kesehatan, melainkan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara langsung. Dengan begitu pengawasan atas barang impor alat Kesehatan tersebut harus diperhatikan mulai dari masuk nya barang ke Indonesia, pengeluaran barang, hingga sampai ke tangan importir. Maka dari itu pengawasan atas barang impor alat Kesehatan tersebut belum bisa di lepas tangankan oleh Beacukai Soekarno Hatta.

Dalam rangka menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan dari alat kesehatan dan PKRT dalam negeri maupun impor maka harus dilakukannya pengendalian serta pengawasan yang ketat terhadap alat kesehatan dan PKRT, salah satunya yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah dengan penerbitan izin

edar. Pada izin edar tersebut meliputi persyaratan administrasi maupun teknis yang di ajukan oleh pelaku usaha demi menjamin mutu, keamanan dan manfaatnya. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan lebih atas barang *Post Border* Alat Kesehatan.

Data rata-rata devisa nasional setiap tahun komoditas alat Kesehatan

Tabel 1 Rata-rata Devisa Nasional setiap tahun komoditas Alat Kesehatan

Tahun	Jumlah Devisa (USD)
2016	1.173.956.064,71
2017	1.169.276.138,39
2018	1.194.099.389,61
2019	1.106.194.902,35
2020	1.405.475.790,45

Sumber : Direktorat Teknis Kepabeanan

Dari data rata-rata devisa nasional tersebut, Impor Alat Kesehatan cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2016-2017 yaitu sebelum pemberlakuan *Post Border* memiliki rata-rata USD 1.171.616.101,55 sedangkan pada tahun 2018-2020 yaitu setelah pemberlakuan *Post Border* memiliki rata-rata USD 1.235.256.708,99. Dari data tersebut devisa mengalami kenaikan sebesar 5,43% atau sekitar USD 63.640.607,44. Dari banyak devisa negara yang diterima dari impor Alat Kesehatan maka perlukan adanya kebijakan *Post Border* untuk mempercepat proses *dwelling time*, biaya logistik, dan untuk simplifikasi tata niaga impor.

Atas dasar di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai barang lartas komoditas alat kesehatan, untuk mengamati praktik pengawasan sebelum dan

sesudah penerapan *Post Border*. Selain itu penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala seperti waktu penyelesaian dan pengawasan terhadap barang lintas komoditas alat kesehatan di Bandara Soekarno Hatta. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat tema mengenai barang lintas komoditas alat kesehatan yang berkaitan dengan sebelum dan sesudah penerapan *Post Border* dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PENGAWASAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATAAN KOMODITAS ALAT KESEHATAN IMPOR SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN POST BORDER DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana perbedaan waktu penyelesaian barang lintas sebelum dan sesudah penerapan *Post Border* di KPUBC Tipe C Soekarno Hatta.
2. Bagaimana perbedaan pengawasan barang lintas sebelum dan sesudah penerapan *Post Border* di KPUBC Tipe C Soekarno Hatta.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini antara lain:

1. Mengetahui perbedaan waktu penyelesaian barang lintas sebelum dan sesudah penerapan *Post Border* di Bandara Soekarno Hatta.
2. Mengetahui perbedaan pengawasan barang lintas sebelum dan sesudah penerapan *Post Border* di Bandara Soekarno Hatta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Memahami keterbatasan sumber daya, penulis membatasi penelitian dengan beberapa hal. Ruang lingkup penelitian ditentukan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bandara Soekarno Hatta khususnya di lingkungan kerja KPUBC Tipe C Soekarno Hatta
2. Analisis dilakukan berdasarkan kesesuaian data yang terjadi di lapangan pada rentang tahun 2016 – 2020.

Penelitian ini dilakukan terhadap data yang tersedia dari barang impor komoditas alat kesehatan di KPUBC Tipe C Soekarno Hatta.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan karya tulis ini yang hendak penulis capai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk kepentingan umum, masyarakat luas dan penerima manfaat lainnya.

1. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumber rujukan pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tulisan ini.

2. Manfaat bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran terkait dengan keefektifan penerapan *Post Border*, pada bagian pengawasan maupun *dwelling time*.

3. Manfaat bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penerapan *Post Border* kepada masyarakat umum.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan dari penulis terkait pendahuluan yang meliputi latar belakang pengambilan judul, rumusan masalah yang akan penulis bahas, tujuan penulisan yang ingin penulis capai, ruang lingkup penelitian penulis, juga manfaat yang bisa didapatkan dari penyusunan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dasar hukum karya tulis ini, landasan teori, dasar-dasar pemikiran dan ketentuan yang relevan untuk dituangkan ke karya tulis ini yang berkaitan dengan Impor Barang Larangan dan Pembatasan komoditas Alat Kesehatan di KPUBC Tipe C Soekarno Hatta.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian dan untuk memecahkan rumusan masalah yang telah penulis tentukan, menjelaskan gambaran umum terkait objek yang akan di bahas, serta melakukan analisis dengan data-data yang tersedia.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan serta memberikan masukan dan saran sebagai alternatif solusi penyelesaian seputar permasalahan impor Barang Larangan dan Pembatasan komoditas Alat Kesehatan.